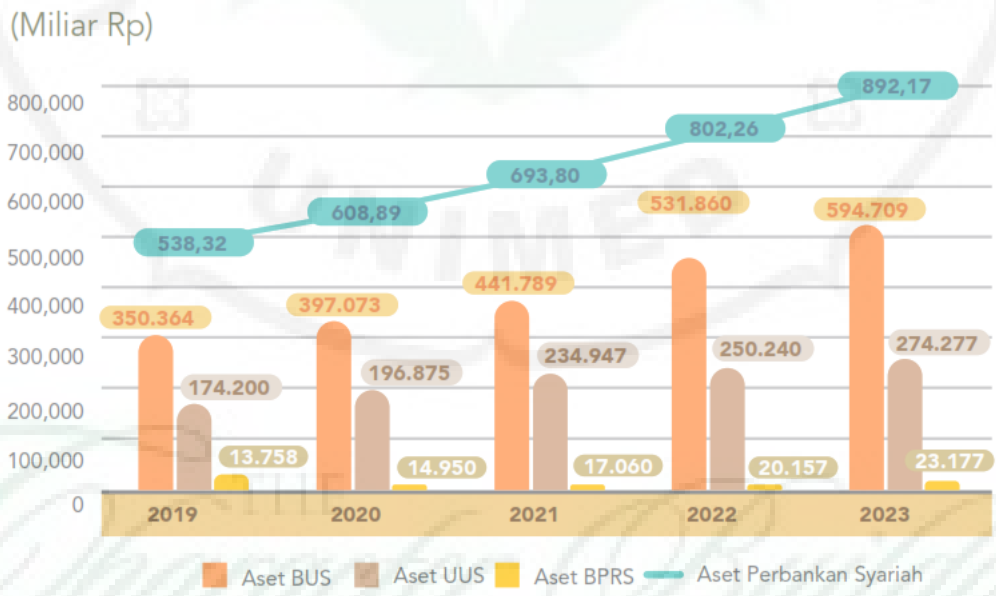
BAB I
PENDAHULUAN

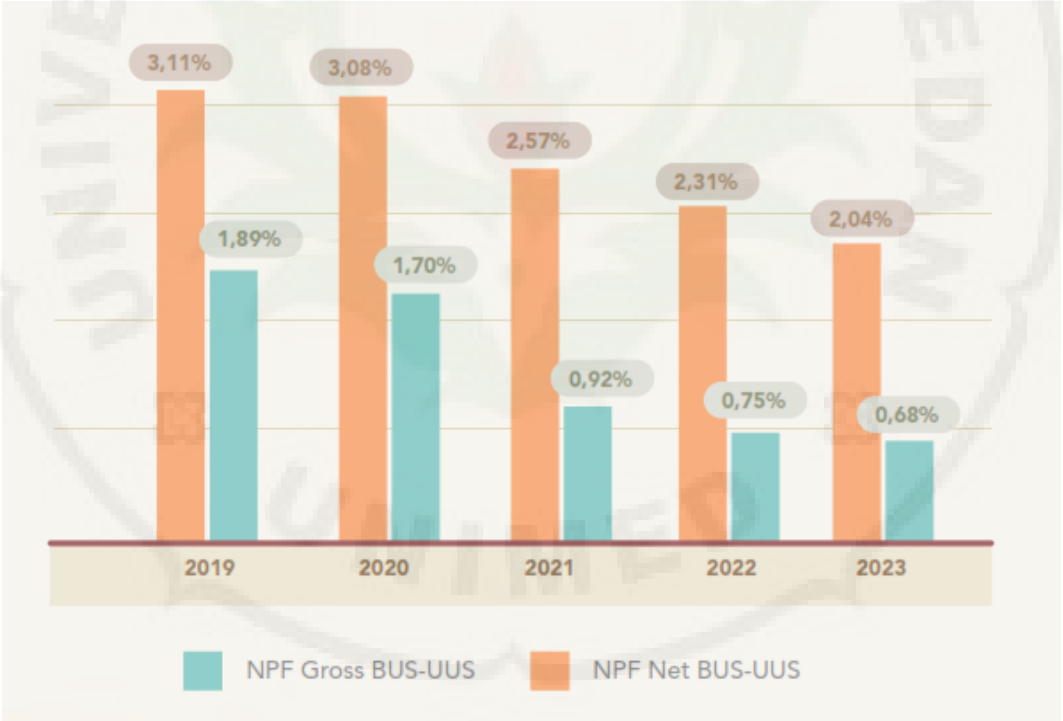
1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang terus berkembang dalam sistem keuangan Indonesia. Bank Umum Syariah (BUS) memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip syariah dan didukung oleh regulasi yang semakin kuat, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Penguatan regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan pengawasan lembaga keuangan syariah.



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2023

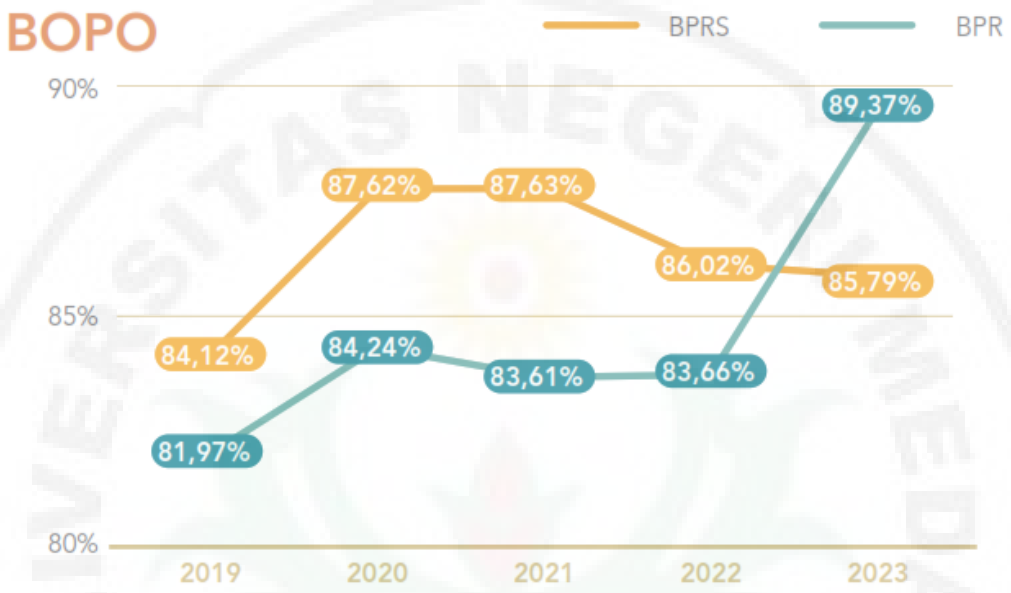
Selama periode 2018–2023, pertumbuhan BUS menunjukkan perkembangan yang stabil. Total aset BUS meningkat dari Rp316,69 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp573,24 triliun pada tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 12% per tahun. Peningkatan aset ini turut diikuti dengan kenaikan pangsa pasar BUS dalam industri perbankan nasional, menandakan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2023

Gambar 1.2
Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *Gross* Bank Umum Syariah 2018–2023

Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas aset BUS justru menunjukkan perbaikan. Rasio Non-Performing Financing (NPF) turun dari 3,23% pada 2018 menjadi 2,04% pada 2023. Penurunan ini menunjukkan meningkatnya kualitas pembiayaan serta efektivitas manajemen risiko pada BUS*)* menurun dari 84,41% pada 2018 menjadi 79,49% pada 2023, menunjukkan bahwa BUS semakin efisien dalam mengelola beban operasional terhadap pendapatannya.



Gambar 1. 3
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Umum Syariah 2018–2023

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2023

Selain kualitas aset, efisiensi operasional BUS juga membaik. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menurun dari 84,41% pada 2018 menjadi 79,49% pada 2023. Namun, peningkatan efisiensi dan penurunan risiko ini belum sepenuhnya tercermin dalam profitabilitas yang stabil, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai faktor lain yang memengaruhi kinerja keuangan BUS.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi dinamika kinerja tersebut adalah tata kelola dan mekanisme pengawasan internal. Pada BUS, pengawasan dilakukan melalui beberapa organ, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), Komite Audit, dan Komisaris Independen. Ketiga organ ini memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi dalam menjaga kepatuhan, memastikan keandalan laporan keuangan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Berbagai penelitian menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh ukuran DPS, frekuensi rapat Komite Audit, dan proporsi Komisaris Independen

terhadap kinerja bank syariah. Ada penelitian yang menemukan hubungan positif, namun ada juga yang menemukan hasil berbeda. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme pengawasan internal masih menjadi isu yang perlu diuji lebih lanjut, khususnya pada konteks industri perbankan syariah Indonesia.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan bank karena mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari seluruh sumber daya yang dimilikinya. Profitabilitas menunjukkan sejauh mana manajemen mampu mengelola aset dan modal secara efektif untuk menghasilkan keuntungan (Brigham & Houston, 2019). Dalam konteks Bank Umum Syariah, tingkat profitabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor operasional dan risiko pembiayaan, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola serta mekanisme pengawasan internal.

Berdasarkan Agency Theory, hubungan antara pemilik dan manajemen berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (agency conflict) yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan diperlukan untuk mengurangi asimetri informasi dan perilaku oportunistik manajemen. Oleh karena itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan Komisaris Independen sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal berperan dalam memperkuat fungsi kontrol, meningkatkan transparansi, serta memastikan pengelolaan perusahaan berjalan sesuai kepentingan pemilik. Pengawasan yang efektif tersebut pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan profitabilitas Bank Umum Syariah. Dengan demikian, secara teoritis mekanisme pengawasan internal memiliki keterkaitan yang erat dengan profitabilitas, sehingga hubungan tersebut penting untuk diuji secara empiris dalam penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana mekanisme pengawasan internal yang terdiri dari ukuran Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Komite Audit, dan proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Dengan demikian, penelitian ini mengusung judul “Pengaruh Ukuran

Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Rapat Komite Audit, dan Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2018–2023."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan hasil empiris (*research gap*) (terutama mengenai konflik teori/temuan) mengenai pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.
2. Adanya perbedaan temuan mengenai pengaruh intensitas pengawasan internal, yang diproksikan melalui Jumlah Rapat Komite Audit, terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.
3. Adanya inkonsistensi hasil penelitian mengenai hubungan antara Proporsi Komisaris Independen, sebagai mekanisme tata kelola, dengan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.
4. Belum adanya kajian yang secara spesifik menguji ketiga variabel independen ini (Ukuran DPS, Jumlah Rapat Komite Audit, dan Proporsi Komisaris Independen) secara simultan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dalam kurun waktu yang sangat relevan (periode 2018–2023).

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memastikan fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini dibatasi pada:

1. Objek Penelitian seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia.
2. Variabel Penelitian:
   - Variabel Independen (X): Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Rapat Komite Audit, dan Proporsi Komisaris Independen.

- Variabel Dependen (Y): Kinerja Keuangan, yang akan diproksikan menggunakan *Return on Equity (ROE)*, sebagai pengukuran berbasis akuntansi yang umum digunakan untuk efisiensi operasional.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?
2. Apakah Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?
3. Apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?
4. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Rapat Komite Audit, dan Proporsi Komisaris Independen secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023.
2. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023.
3. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023.
4. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Rapat Komite Audit, dan Proporsi

Komisaris Independen secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018–2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik
   Memberikan tambahan referensi dan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Komite Audit, dan proporsi Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
   Menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dan pihak pengawas Bank Umum Syariah dalam meningkatkan efektivitas struktur pengawasan internal untuk mendukung perbaikan kinerja keuangan.
3. Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya
   Dapat digunakan sebagai acuan, pembanding, atau dasar pengembangan penelitian lain yang membahas tata kelola dan kinerja perbankan syariah.
4. Manfaat bagi Penulis
   Meningkatkan pemahaman penulis mengenai mekanisme pengawasan internal pada Bank Umum Syariah serta penerapan analisis data empiris dalam penelitian akuntansi..